

## DAFTAR RUJUKAN

- Any Farida dan Nasichin. (2018). *Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia (Teori Hukum Pancasila sebagai Perwujudan Teori Hukum Transendental)*. Jurnal Hukum Transendental
- Arief Budiman. (1994). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arinto Nurcahyono, Husni Syam, dan Yuhka Sundaya. (2015). Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 31(2)
- Drajat Tri Kartono dan Hanif Nurcholis. (2016). *Konsep dan Teori Pembangunan*. Modul Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota. Universitas Terbuka.
- Faizi, Fuad, dan A. Syatori. (2017). Taman Nasional, Fracking, dan Reorganisasi Teknik Pendisiplinan Akses Atas Air: Basis Argumentasi Penolakan Rencana Ekstraksi Panas Bumi di Gunung Ciremai. *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial*, 35(XIX)
- Geografis Desa Prambon. (2026). Diakses dari <https://prambontugu.trenggalekkab.go.id/> pada 8 Januari 2026 pukul 17.17 WIB.
- Hajar, D. R. S., & S. SOS. (2021). *Pemerintahan Desa dan Kualitas Pelayanan Publik*. Vol. 1. Medan: UMSU Press.
- Hasil dokumentasi di Kantor Desa Prambon, 8 Januari 2026.
- Hasil dokumentasi kondisi sumur di Desa Prambon, 8 Januari 2026.
- Hasil dokumentasi tandon air di RT 16 Dusun Krajan Desa Prambon, 8 Januari 2026.
- Hasil observasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek.
- Hasil wawancara dengan Bapak Bakti Dwi Prasetyo selaku Plt. Kepala Bidang Logistik, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi (Log Lekon).
- Hasil wawancara dengan Bapak Dedik Wahyu Setyo Budi, S.T., M.A.P., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek, 8 Januari 2026.
- Hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku Kepala Dusun Desa Prambon Kecamatan Tugu, 8 Januari 2026.
- Hasil wawancara dengan Ibu Wartini, warga RT 16 RW 03 Desa Prambon Kecamatan Tugu, 8 Januari 2026.
- Hasil wawancara dengan Ibu Zulikah, warga RT 16 RW 03 Desa Prambon Kecamatan Tugu, 21 Februari 2026
- Hasil wawancara dengan Bapak Muawam, warga RT 16 RW 03 Desa Prambon Kecamatan Tugu, 21 Februari 2026

- Henny Nuraeny. (2015). Pengiriman Tenaga Kerja Migran sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(3)
- Ibnu Syarif, Mujar, dan Khamami Zada. (2008). *Fiqh Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim Jindan, Khalid. (1995). *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiah tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Kumba Digdowiseiso. (2019). *Teori Pembangunan*. Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.
- M. Kudeng Sallata. (2015). Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Keberadaannya sebagai Sumber Daya Alam. *Buletin Eboni*, 12(1)
- Mochtar Kusumaatmadja. (1986). *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- Rasyid, R. (2000). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Ronny Winarno, Endang Retnowati, dan Ardhiwinda Kusumaputra. (2024). *Jurnal Yustitiabelen*, 10(1)
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju.
- Shahih Muslim. (1978). *Kitab al-Musaqah*. Diterjemahkan oleh Abdul Hamid Siddiqi. New Delhi: Kitab Bhavan.
- Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Trenggalek. (2026). Diakses dari <https://bpbd.trenggalekkab.go.id/struktur-organisasi/> pada 8 Januari 2026 pukul 17.40 WIB.
- Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek. (2026). Diakses dari <https://dinaspuvr.trenggalekkab.go.id/hal/tugas-dan-fungsi> pada 8 Januari 2026 pukul 17.29 WIB.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nations General Assembly. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*. Resolution 2200A (XXI).
- United Nations General Assembly. (1966). *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*. Resolution 2200A (XXI).
- Waesul Kurni. (2016). Air dalam Al-Qur'an dan Fungsinya dalam Kehidupan. *Jurnal Al-Ashriyyah*, 1, 129–150.
- Wiwik Harjanti. (2020). Hak Atas Air dalam Konstitusi Negara dan Pengelolaannya di Indonesia. *Risalah Hukum*, 5(2), 17.

Yanuar J. Purwanto dan Agus Susanto. (2020). *Modul 1: Pengantar Pengelolaan Sumber Daya Air*. Universitas Terbuka. Diakses dari <http://repository.ut.ac.id/4313/1/PWKL4221-M1.pdf>.  
Zairin Harahap. *Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada